

Catatan Atas Rankhir RPJMD Kota Salatiga 2025 – 2029

Oleh: Dr. Madekhan Ali, M.Si

Catatan 1:

Di dalam Dasar Hukum sejumlah Peraturan perundang-undangan yang sangat berpengaruh pada konfigurasi pembangunan daerah Kota Salatiga telah di dicantumkan tetapi tidak menjadi basis analisis pada bagian selanjutnya. Di antaranya:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

UU No.1 Tahun 2022 adalah peluang signifikan bagi Pemerintah Kota Salatiga untuk memperkuat kapasitas fiskal, merencanakan pembangunan yang berorientasi hasil, serta membiayai pembangunan berkelanjutan. Namun, sukses implementasi menuntut peningkatan SDM, penguatan sistem perencanaan & pengawasan, serta optimalisasi dana dan PAD.

Meskipun pada bagian Dasar Hukum sudah mencantumkan UU No.1 Tahun 2022 tentang HPKD, namun pada **2.5.3. Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan belum terdapat kebijakan atau strategi pendapatan dan belanja daerah, dimana memuat implikasi UU No.1 Tahun 2022 tentang HPKD terhadap APBD Kota Salatiga Tahun 2025-2029.**

Sebagai referensi penyusunan kerangka kebijakan keuangan daerah, UU No.1 Tahun 2022 (UU HKPD) memberi dampak yang signifikan terhadap pembangunan

dan penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti Salatiga. Berikut implikasi utamanya:

1. Peningkatan Otonomi Fiskal & PAD (Pendapatan Asli Daerah)

- UU ini memperluas kewenangan daerah dalam memperbarui tarif pajak dan retribusi serta mengenakan "opsen pajak" (opsional surcharge), sehingga Salatiga bisa mendiversifikasi dan meningkatkan PAD secara mandiri untuk pendanaan pembangunan local.
- Penyederhanaan jenis pajak daerah dan retribusi ditujukan untuk mengurangi biaya administrasi dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak

2. Transfer dan Alokasi Dana Daerah Berdasarkan Kinerja

- Alokasi TKD (DAU, DAK, DBH, Dana Desa) kini didasarkan pada kinerja dan kebutuhan riil daerah, yaitu berorientasi kuantitatif terhadap capaian pelayanan public.
- Semua penyaluran dana dilakukan melalui KPPN daerah mulai 2023, meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kecepatan distribusi, yang sangat bermanfaat untuk proyek pembangunan di Salatiga

3. Penganggaran Berbasis Kinerja & Disiplin Belanja

- UU HKPD mewajibkan sistem perencanaan dan penganggaran daerah berbasis kinerja (KUA-PPAS-APBD fokus pada output dan outcome), disertai integrasi SIKD dan pelaporan kinerja berkala.
- Anggaran pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur) kini lebih terstandarisasi, efisien, dan terfokus pada hasil, menuntut Salatiga untuk menyusun APBD dengan disiplin tinggi.

4. Peningkatan Kapasitas SDM & Pengawasan

Pemerintah daerah diwajibkan mensertifikasi pengelola keuangan dan melibatkan aparat pengawas intern, meningkatkan akuntabilitas dalam perencanaan & pelaksanaan anggaran

5. Akses Pembiayaan Daerah untuk Infrastruktur

Kota Salatiga kini dapat memanfaatkan skema pembiayaan seperti pinjaman pemerintah, obligasi daerah, atau sukuk daerah secara lebih mudah, dengan perizinan lebih jelas dan syariah tersedia. Ini membuka peluang pembiayaan proyek infrastruktur kota, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik.

Untuk itu **direkomendasikan** adanya kebijakan/strategi tatakelola keuangan daerah untuk RPJMD 2025-2029 setidaknya dalam ruang lingkup:

1. Peningkatan Kapasitas SDM
Pengelola keuangan dan perencana daerah perlu ditingkatkan kemampuan melalui pelatihan sertifikasi dan digitalisasi SIKD.
2. Sistem Monitoring & Evaluasi
Membangun dashboard real-time untuk memantau indikator kinerja dan realisasi anggaran.
3. Optimalisasi PAD
Mengembangkan potensi pajak/retribusi lokal—seperti pariwisata, parkir, dan izin usaha—secara efisien dan tidak memberatkan masyarakat.
4. Kolaborasi Pembiayaan
Merancang instrumen sukuk atau obligasi daerah dengan BUMD sebagai underlier untuk pembiayaan proyek jangka panjang.
5. Konsistensi Kebijakan Fiskal
Menyusun Perda pajak dan retribusi yang selaras dengan semangat UU HKPD—sederhana, transparan, dan berbasis kinerja.

Rekomendasi di atas juga selaras dengan rekomendasi BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah dalam dokumen HASIL KONSULTASI RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA SALATIGA TAHUN 2025-2029 dimana **belum ditindaklanjuti**, antara lain:

Pada Bagian III Gambaran Keuangan No. 2 Pendapatan Daerah

- b. Menambahkan arah kebijakan seperti Pengelolaan Opsen Pajak pendapatan sebagai tindak lanjut PKS tentang Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak dimana Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban terkait pendataan, sosialisasi, penanganan tunggakan, bahkan ada alokasi anggaran yang harus dipasang dari opsen pajak.*
- c. Menambahkan upaya-upaya konkrit dalam peningkatan kinerja pendapatan daerah.*

Dan pada Bagian III Gambaran Keuangan No. 3 Belanja Daerah:

- a. Menambahkan fokus utama penggunaan belanja daerah dan juga uraian arah kebijakan penggunaan masing-masing komponen belanja (belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bansos), belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer).
- b. Memperhatikan pengalokasian belanja pegawai yang masih di atas 30% atau masih diatas batas yang ditentukan.

Dan pada Bagian III Gambaran Keuangan No. 4 Pembiayaan Daerah:

- a. Menambahkan analisa terkait penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan*
 - b. Mencermati alokasi penyertaan modal di Kota Salatiga karena tidak dianggarkan.*
- 5. Mencermati penentuan besaran Silpa agar memperhatikan ketentuan batasan maksimal defisit sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan (Peraturan Menteri Keuangan)*
- 6. Dalam kerangka pendanaan perlu diperhitungkan rencana pembiayaan pelaksanaan pilkada periode selanjutnya.*

7. *Alternatif pembiayaan. Dalam hal ini daerah didorong dengan adanya keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan pelayanan publik dan pembangunan daerah dibutuhkan adanya peningkatan pendapatan daerah serta alternatif pendanaan lain seperti penguatan pembiayaan melalui pendanaan inovatif yang sebaiknya dipenuhi dari sumber dana non-pemerintah, seperti Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang mengamanatkan implementasi Sinergi Pendanaan serta Pembiayaan Utang Daerah melalui pemanfaatan pinjaman daerah, obligasi dan sukuk daerah, untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam penyediaan infrastruktur. skema pendanaan yang dapat dimanfaatkan diantaranya hibah, pinjaman daerah, KPBU, BUMD, BLUD, CSR, filantropi, ziswaf dan skema pendanaan lainnya.*

Catatan 2

Identifikasi permasalahan harus mendasarkan data pada Bab II, laporan KLHS RPJMD ataupun penjaringan aspirasi yang merupakan pernyataan kondisi yang dapat disimpulkan kesenjangan antara realita dengan kondisi ideal, selanjutnya isu strategis sesuai lingkungan dinamis yang dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Mendasarkan pada idealitas konseptual demikian, beberapa kelemahan perumusan permasalahan daerah Kota Salatiga di antaranya:

NO	Kelemahan	Contoh Masalah	Catatan
1	Masalah Terlalu Umum dan Tidak Spesifik Beberapa pernyataan masih bersifat deskriptif dan kurang tajam dalam merumuskan inti masalah. Misalnya:	<i>Belum optimal dalam memanfaatkan peranannya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional..."</i> <i>"Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam..."</i>	Tidak dijelaskan indikator "belum optimal" itu apa (apakah rendahnya investasi, minimnya infrastruktur, atau lemahnya konektivitas transportasi?). Sama halnya, "belum optimal" terlalu luas, tidak dijelaskan secara kuantitatif (berapa persen potensi yang belum tergarap, misalnya wisata alam, pertanian berbasis teknologi, dll).

NO	Kelemahan	Contoh Masalah	Catatan
2	<p>Kurangnya Akar Penyebab (<i>Root Cause Analysis</i>)</p> <p>Semua masalah hanya dijabarkan sebagai gejala atau dampak, belum ada upaya mengurai penyebab utamanya.</p>	<p>Misalnya, masalah defisit lahan (poin d): tidak dijelaskan mengapa terjadi ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan (urbanisasi? tata ruang tidak efisien? kebijakan pengembangan kota yang tidak sesuai daya dukung?)</p>	<p>Tambahkan unsur sebab-akibat agar bisa dirumuskan isu strategis dan strategi intervensi yang lebih tepat.</p>
3	<p>Kurangnya Data Pendukung atau Kuantifikasi Masalah dimana seyogyanya mengacu pada analisis data Bab II)</p> <p>Beberapa masalah disampaikan tanpa menyertakan data (utama) pendukung:</p>	<p>Seperti masalah "luapan air", "kekurangan air bersih", atau "jumlah lansia meningkat" – tidak disebutkan <i>berapa besar dampaknya, berapa persen penduduk terdampak, atau tren statistiknya.</i></p>	<p>Sertakan data atau kutipan hasil studi/analisis teknokratik agar masalah bisa divalidasi dan diranking urgensinya.</p>
		<p><i>Kota Salatiga yang berada di persimpangan jalur utama Semarang–Solo, belum optimal dalam memanfaatkan peranannya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional dengan kondisi sumberdaya yang dimiliki saat ini.</i></p>	<p>Misalnya, ubah poin a menjadi: <i>Kota Salatiga belum mampu menarik arus investasi dan arus logistik regional secara maksimal meskipun berada di jalur strategis Semarang–Solo, yang ditunjukkan selama lima tahun terakhir rasio PDRB Industri Pengolahan mengalami penurunan sebesar 054%. keterbatasan kawasan industri, dan minimnya konektivitas antar-kecamatan.</i></p>
4	<p><i>Kalimat terlalu umum, Kurang focus, spesifik dan Terukur,</i></p>	<p><i>h. Belum optimalnya pencapaian tingkat kesehatan keluarga</i></p>	<p><i>Beberapa masalah tidak disertai data kuantitatif atau indikator konkret, misalnya "belum optimalnya pencapaian tingkat kesehatan keluarga" (poin h) atau "belum</i></p>

NO	Kelemahan	Contoh Masalah	Catatan
		<p><i>o. Belum optimalnya peran pemuda dalam mendukung kegiatan ekonomi dan prestasi olahraga.</i></p>	<p><i>optimalnya peran pemuda” (poin o).</i></p> <p><i>Kalimat seperti ini kurang jelas arah dan skalanya.</i></p>
		<p><i>Masih kurangnya dukungan pengembangan dan pelestarian nilai seni dan budaya daerah dan peningkatan pelestarian kota pusaka</i></p>	<p><i>Misalnya poin 1 tentang “kurangnya dukungan pelestarian seni dan budaya” terlalu umum tanpa menyebutkan aspek spesifik yang kurang, seperti sarana, anggaran, atau partisipasi masyarakat.</i></p> <p>Dapat diubah menjadi: <i>Pengembangan dan pelestarian nilai seni dan budaya Salatiga sebagai Kota Pusaka belum memadai, yang berdampak pada menurunnya pelestarian warisan budaya dan potensi pariwisata lokal.</i></p>
5	<p><i>Kalimat Masih Berbentuk Kebutuhan atau Solusi, Bukan Masalah</i></p>	<p>a. Perlunya peningkatan infrastruktur digital yang merata, literasi digital aparatur, serta sistem informasi antar-perangkat daerah.</p> <p>b. Perlunya peningkatan kualitas sumber daya aparatur, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan, penerapan standar pelayanan yang jelas dan terukur, pengembangan birokrasi dan penguatan sistem pengawasan dalam pelayanan publik.</p> <p>c. Perlunya peningkatan koordinasi antar instansi, penegak hukum, peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi daerah.</p>	<p><i>Semua kalimat diawali dengan “Perlunya peningkatan...” yang lebih mengarah pada kebutuhan atau solusi daripada merumuskan masalah nyata yang sedang terjadi.</i></p> <p><i>Sebaiknya perumusan masalah menggambarkan kondisi saat ini atau hambatan yang dihadapi, misalnya “Infrastruktur digital belum merata...” atau “Literasi digital aparatur masih rendah...”.</i></p>

Catatan 3

Berdasarkan rumusan penjelasan Isu Strategis halaman II-197 s/d II - 202, terdapat sejumlah kelemahan mendasar dalam perumusan penjelasan isu strategis.

NO	ISU STRATEGIS	CATATAN	SARAN
a	Kemiskinan dan kesenjangan	<p>Rumusan terlalu panjang, naratif, dan deskriptif seperti esai, bukan berbentuk pernyataan isu strategis yang padat dan operasional.</p> <p>Isu strategis seharusnya dirumuskan dalam kalimat singkat yang menggambarkan tantangan utama yang perlu diatasi secara lintas sektor, bukan uraian berparagraf panjang</p> <p>Dalam satu paragraf, terdapat: (a) pernyataan masalah (kemiskinan, kesenjangan, pengangguran), (b) penyebabnya (pendidikan, keterampilan), dan (c) solusi (pelatihan vokasi, kerja sama industri). Ini menyebabkan rumusan isu kehilangan fokus utamanya dan sulit dijadikan dasar arah kebijakan yang tajam.</p>	<p>Rumusan isu hendaknya hanya menyebutkan kondisi strategis utama yang menjadi tantangan, bukan langsung masuk ke solusi atau analisis terlalu dalam.</p> <p>Penyampaian hendaknya mengikuti struktur isu strategis RPJMD, yang idealnya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Deskripsi singkat isu,(2) Indikator atau fakta pendukung,(3) Tantangan atau implikasi strategis.
b	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia.	1. Terlalu Deskriptif, Tidak Dirumuskan dalam Bentuk Isu Strategis yang Jelas	Isu Strategis 1: Masih rendahnya cakupan dan kualitas

NO	ISU STRATEGIS	CATATAN	SARAN
		<p>Kelemahan: Paragraf panjang berisi narasi tentang tantangan dan fokus pembangunan, tapi tidak dirumuskan menjadi pernyataan isu yang tajam, singkat, dan strategis.</p> <p>Idealnya, isu strategis berbentuk pernyataan ringkas yang menggambarkan tantangan utama pembangunan SDM yang mendasar dan lintas sektor.</p> <p>Contoh yang lebih tepat: "Masih rendahnya kualitas layanan dasar pendidikan dan kesehatan serta belum optimalnya pemanfaatan bonus demografi menyebabkan daya saing SDM Kota Salatiga belum maksimal."</p> <p>2. Campur Aduk Antara Masalah, Tujuan, dan Solusi</p> <p>Kelemahan: Kalimat mencampurkan: Tantangan (misalnya</p>	<p>layanan kesehatan dasar serta belum optimalnya pengendalian penyakit dan gizi masyarakat, berdampak pada lambatnya peningkatan derajat kesehatan penduduk.</p> <p>Indikator pendukung: Masih ditemukannya kasus kematian ibu, bayi, dan balita.</p> <p>Angka stunting dan gizi buruk belum mencapai target nasional.</p> <p>Cakupan layanan kesehatan belum merata di seluruh wilayah kota.</p> <p>Implikasi strategis: Perlu peningkatan kualitas sarana, tenaga kesehatan, serta sistem surveilans dan edukasi masyarakat.</p> <p>Isu Strategis 2: Belum meratanya akses dan kualitas pendidikan dasar serta rendahnya</p>

NO	ISU STRATEGIS	CATATAN	SARAN
		<p>kematian ibu dan bayi),</p> <p>Program/solusi (seperti peningkatan KIE, kurikulum lokal), dan tujuan (peningkatan IPM)</p> <p>Hal ini mengaburkan identifikasi masalah pokok yang seharusnya menjadi fokus isu strategis.</p> <p>Dampaknya: Sulit membedakan mana masalah prioritas, mana intervensi kebijakan, dan mana capaian yang diharapkan.</p> <p>3. Tidak Terstruktur, Tidak Mengikuti Format Teknis Isu Strategis</p> <p>Kelemahan:</p> <p>Tidak dibagi berdasarkan struktur baku isu strategis seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uraian kondisi, • Indikator pendukung, • Akar permasalahan, • Implikasi strategis. <p>Selain itu, terlalu banyak rincian teknis program (TTU,</p>	<p>angka partisipasi pendidikan usia dini dan non-formal, menghambat pengembangan SDM yang kompeten dan adaptif.</p> <p>Indikator pendukung:</p> <p>Masih ada anak putus sekolah pada jenjang dasar.</p> <p>Rendahnya angka partisipasi PAUD dan pendidikan non-formal.</p> <p>Distribusi guru bersertifikat dan sarana pendidikan belum merata.</p> <p>Implikasi strategis:</p> <p>Diperlukan penguatan sistem pendidikan formal dan non-formal, serta pemerataan kualitas layanan pendidikan di seluruh wilayah.</p> <p>Isu Strategis 3:</p> <p>Belum optimalnya pemanfaatan bonus demografi dan</p>

NO	ISU STRATEGIS	CATATAN	SARAN
		<p>KIE, PHBS, dsb) yang seharusnya muncul di bagian program prioritas atau strategi, bukan dalam perumusan isu.</p> <p>Dampaknya: Mbingungkan pembaca dokumen perencanaan dan menyulitkan penyusunan strategi kebijakan berbasis isu.</p>	<p>rendahnya relevansi keterampilan SDM terhadap kebutuhan pasar kerja, menyebabkan daya saing tenaga kerja masih lemah.</p> <p>Indikator pendukung:</p> <p>Pengangguran pada lulusan baru masih tinggi.</p> <p>Minimnya kerja sama antara lembaga pendidikan, pelatihan, dan sektor industri.</p> <p>Kesenjangan keterampilan dengan kebutuhan dunia kerja.</p> <p>Implikasi strategis:</p> <p>Perlu reformasi kurikulum vokasional, peningkatan literasi digital, dan kemitraan strategis dengan dunia usaha/industri.</p>

Catatan 4

Tingkat korelasi antara **Arah Kebijakan RPJPD** Kota Salatiga 2025-2045 dengan **Visi RPJMD** 2025-2029 berada dalam tingkatan yang memadai, meski dalam beberapa aspek arah kebijakan RPJPD belum secara eksplisit dicantumkan.

Kode & Arah Kebijakan RPJPD	Tingkat Kesesuaian dengan Visi RPJMD	Simpulan Korelasi
5.1.1.1 Transformasi Ekonomi	✓ Sesuai	Korelasi kuat dengan visi terutama pada orientasi daya saing global ("mendunia"). Namun aspek keberlanjutan kurang eksplisit dalam visi.
5.1.1.2 Transformasi Tata Kelola	▣ Parsial	Korelasi sedang, karena aspek adaptif dan dinamis terkait teknologi dan responsivitas ada, tapi nilai keadilan dan demokratis tidak tercermin dalam visi.
5.1.1.3 Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	● Tidak eksplisit	Korelasi rendah, visi tidak menyebut aspek pemerataan dan kesejahteraan yang merupakan inti kebijakan ini.
5.1.1.4 Transformasi Sosial	✓ Sesuai	Korelasi kuat, visi menekankan energi dan gerak yang dapat diasosiasikan dengan pembangunan SDM unggul dan berdaya saing.
5.1.1.5 Ketahanan Ekologi	▣ Parsial	Korelasi sedang, aspek adaptif dapat dikaitkan dengan kesiapan menghadapi perubahan iklim, tapi keberlanjutan dan pengelolaan SDA tidak eksplisit dalam visi.

Tingkat korelasi antara arah kebijakan RPJPD dan visi RPJMD bersifat **beragam**, dengan beberapa kebijakan (Transformasi Ekonomi dan Sosial) memiliki korelasi **kuat** dan sesuai dengan visi, sementara kebijakan lain (Tata Kelola dan Ketahanan Ekologi) menunjukkan korelasi **parsial** atau sedang. Satu kebijakan (Pembangunan Kewilayahan) memiliki korelasi **rendah** atau tidak eksplisit dengan visi RPJMD. Secara umum, visi RPJMD menonjolkan aspek daya saing, energi, dan adaptif, namun kurang menyinggung aspek pemerataan, keadilan sosial, dan keberlanjutan secara eksplisit. Bila tidak dimungkinkan perubahan redaksional Visi Pembangunan dalam RPJMD, kelemahan ini dapat diantisipasi dengan adanya misi

yang menguatkan “Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan” yaitu di Misi ke – 5 “Mewujudkan infrastruktur perkotaan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui pemerataan dan peningkatan kualitas”.

Catatan 5

Target Kinerja pada tingkat Tujuan Pembangunan belum mencerminkan upaya Pemkot Salatiga mewujudkan “Salatiga yang Mendunia”.

Indikator	Baseline– Target 2030	CAGR	Status	Analisis Rasional	Rekomendasi
IPM	85,72 → 87,67	0,38%	Stagnan	Tren historis 2020–2024 menunjukkan IPM naik +0,65 poin/tahun (dari 83,14 ke 85,72), sedangkan target hanya menambah +1,95 poin dalam 6 tahun (setara 0,32 poin/tahun). Ini jelas lebih rendah dari performa aktual daerah.	Revisi naik ke minimal 88,5 pada 2030 agar sejalan tren historis Salatiga dan target nasional sekaligus untuk mencerminkan ambisi kualitas SDM global.
Pertumbuhan Ekonomi	5,37 → 6,56	3,39%	Moderat	Tren 2021–2024 menunjukkan pertumbuhan stabil di 5,3–5,5% (pasca kontraksi 2020). Target 6,56% hingga 2030 masih dalam rentang yang rasional. Namun penggunaan rentang tahunan (misal: 5,4–6,1%) akan menyulitkan pengawasan.	Pertahankan , tapi ubah target tahunan ke angka tunggal agar pengawasan DPRD lebih presisi. Fokus pada sektor unggulan ekspor dan digital ekonomi agar mencerminkan arah “mendunia”
PDRB Per Kapita	91,1 → 226,11 juta	16,36%	Progresif	PDRB per kapita Salatiga 2020–2024 hanya naik	Revisi turun drastis , target 2030 realistis jika berada di kisaran Rp90–

Indikator	Baseline– Target 2030	CAGR	Status	Analisis Rasional	Rekomendasi
				dari Rp49,5 juta → Rp57,1 juta (CAGR historis ~3,6%). Target 2030 sebesar Rp226 juta berarti kenaikan hampir 4 kali lipat , atau CAGR 16,36% — sangat tidak realistis tanpa lonjakan sektor unggulan.	110 juta. Dorong program peningkatan nilai tambah produk lokal dan digitalisasi UMKM untuk mendukung pertumbuhan yang lebih substansial dan global-oriented.
TPT	3,86% → 3,54%	-1,43%	Minimal	TPT turun drastis dari 7,44% (2020) ke 3,86% (2024), atau -0,9 poin/tahun. Target 2030 hanya menurunkan 0,32 poin dalam 6 tahun (CAGR rendah). Ini menunjukkan penurunan target yang justru lebih lambat dari kinerja aktual.	Revisi turun , target 2030 idealnya <3% mengikuti tren penurunan tajam selama 4 tahun terakhir. Kembangkan program kewirausahaan digital, green jobs, dan link-and-match pendidikan vokasi dengan industri untuk menguatkan penyerapan tenaga kerja berkualitas global.
Kemiskinan	4,57% → 4,20%	-1,40%	Minimal	Angka kemiskinan turun dari 4,94% (2020) ke 4,57% (2024), hanya -0,37 poin dalam 4 tahun (~-0,1 poin/tahun). Target 2030 menurunkan 0,37 poin dalam 6 tahun → tidak ambisius , dan stagnan.	Revisi turun , minimal ke <3%, terutama jika sinergi program perlindungan sosial ditingkatkan. Perkuat program perlindungan sosial berbasis data terpadu , serta integrasi UMKM, digitalisasi bantuan, dan pemberdayaan ekonomi rumah tangga.
Indeks Reformasi Birokrasi	80,67 → 84,00	0,68%	Minimal	Tidak tersedia data tren tahunan. Namun kenaikan 3,3 poin dalam 6 tahun cukup standar (0,55 poin/tahun), meskipun tidak menunjukkan	Pertahankan , tapi beri perhatian pada integrasi SPBE, pelayanan publik, dan SDM aparatur. Dorong inovasi pelayanan publik yang mudah diakses secara digital, termasuk untuk investor asing,

Indikator	Baseline– Target 2030	CAGR	Status	Analisis Rasional	Rekomendasi
				lompatan reformasi.	sebagai bagian dari branding kota yang mendunia.
Penurunan Emisi GRK	13.289 → 226.361 ton	60,40%	Progresif	Tidak tersedia data historis GRK untuk Salatiga. Namun target naik 17x lipat dalam 6 tahun butuh justifikasi teknis (baseline, sektor penyumbang, NDC daerah).	Pertahankan , jika sudah selaras NDC dan memiliki roadmap aksi mitigasi sektor transportasi, energi, dll. Tambahkan program seperti “ Salatiga Hijau ”, elektrifikasi transportasi publik, dan efisiensi energi sektor publik.
Indeks Daya Saing Daerah	4,16 → 6,00	6,29%	Progresif	Tidak tersedia data tren sebelumnya. Namun peningkatan 1,84 poin dalam 6 tahun realistis jika didukung program inovasi daerah, SDM, infrastruktur, dan digitalisasi.	Masalah: Tidak ada indikator turunan untuk pengawasan yang efektif khususnya dari DPRD. Saran: Pertahankan target, tapi tambahkan indikator turunan, seperti: Inovasi daerah (jumlah inovasi/aplikasi publik), Infrastruktur digital (akses dan kecepatan internet), Investasi asing/domestik, Skor ease of doing business daerah. 4 indikator turunan ini akan mendukung pencapaian kota Salatiga yang berdaya saing global.

Untuk benar-benar mewujudkan “Salatiga yang Mendunia”, maka seyogyanya target kinerja pada sejumlah indikator pembangunan Kota Salatiga mencerminkan:

1. Lebih ambisius namun realistis, terutama yang menyangkut SDM, kemiskinan, dan pengangguran.
2. Memiliki orientasi global: daya saing, inovasi, digitalisasi, dan keberlanjutan.
3. Disertai penguatan indikator turunan, agar pengawasan DPRD dan publik bisa lebih tajam.